

**Komunikasi Kebijakan Infrastruktur Era Pemerintahan Joko  
Widodo: Studi Kasus Di Kantor Staf Presiden (KSP)**

**Communication of Infrastructure Policy in the Era of Joko  
Widodo's Administration: A Case Study at the Presidential Staff  
Office (KSP)**

**Rita Nurlita<sup>1</sup>, Gun Gun Heryanto<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mercu Buana Jakarta; <sup>2</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
<sup>1</sup>Jalan Meruya Selatan No. 1, Meruya Selatan, Kembangan, RT.4/RW.1, Meruya Sel., Kec.  
Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11650  
Email : <sup>1</sup>ritanurlitasetia@gmail.com ; <sup>2</sup>gun.heryanto@uinjkt.ac.id

Received : March 7, 2022 ; Revised: May 20, 2022; Accepted: August 10, 2022

**Abstract**

*One of the national strategy program of the Joko Widodo (Jokowi) government is infrastructure development. The construction of toll roads, public transportations, new capital as well as a number of other facilities are decided and carried out by the government. There are many challenges, especially in explaining the communication side why various infrastructure projects are important. The Presidential Staff Office (KSP) is an institution that assists the president in overcoming cross-sectoral communication between the President of the Republic of Indonesia and various parties both internally and externally. This article aims to analyze the communicative performance of Deputy IV of the Presidential Staff Office (KSP) in communicating infrastructure policies in the era of President Joko Widodo's administration (2014-2019). As one of the managers of public communications, Deputy IV KSP participates in the management and dissemination of government policy information according to Presidential Instruction (Inpres) No. 9/2015. The researcher uses the concept of communicative performance contained in organizational theory ranging from ritual performance, cultural performance, social performance, political performance and enculturation performance as well as the concept of political communication to determine the communication performance of the Presidential Staff Office's policy in the infrastructure sector. The results showed that the communicative performance carried out by KSP was dominated by task performance. Task performance is connected with the main task of debottlenecking. KSP to be the president's "eyes" and "ears" in finding, concluding and recommending data. Based on the results of this study, it is necessary to have intensive coordination and clear implementation of tasks so that there are no "overlapping" functions with other government institutions.*

**Keywords:** *Communicative Performance; Infrastructure Policy; Policy Communication; Presidential Staff Office*

### Abstrak

Salah satu program strategis nasional Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) adalah pembangunan infrastruktur dimana tantangannya dalam menjelaskan dari sisi komunikasi terkait proyek infrastrukturnya. Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan institusi yang membantu presiden dalam mengatasi jarak komunikasi lintas sektor antara Presiden RI dengan beragam pihak baik di internal birokrasi maupun eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performa komunikatif Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) dalam melakukan komunikasi kebijakan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019). Sebagai salah satu pengelola komunikasi publik, Kedeputian IV KSP turut dalam pengelolaan dan diseminasi informasi kebijakan pemerintah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2015. Peneliti menggunakan konsep performa komunikatif yang terdapat dalam teori budaya organisasi mulai dari performa ritual, performa hasrat, performa sosial, performa politis dan performa enkulturasi serta konsep komunikasi politik untuk mengetahui kinerja komunikasi kebijakan Kantor Staf Presiden dalam bidang infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa performa komunikatif yang dilakukan oleh KSP dalam menjalankan fungsi komunikasi politiknya didominasi oleh performa tugas. Performa tugas terhubung dengan tugas utama *debottlenecking*. KSP menjadi “mata” dan “telinga” presiden dalam menemukan, menyimpulkan serta memberi rekomendasi data. Diperlukan adanya koordinasi yang intensif serta implementasi tugas yang jelas sehingga tidak terjadi fungsi yang “tumpang tindih” dengan lembaga pemerintahan lainnya.

**Kata Kunci:** Kantor Staf Presiden; Kebijakan Infrastruktur; Komunikasi Kebijakan; Performa Komunikatif

### 1. Pendahuluan

Program infrastruktur, satu dari tiga fokus utama dalam Program Strategis Nasional (PSN) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari 225 PSN dan 100 Proyek Prioritas Nasional (PPN), bidang infrastruktur menempati posisi teratas dengan jumlah anggaran terbesar yakni mencapai Rp. 420 Triliun. Angka ini meningkat sebesar 157% dari tahun 2014 yang hanya Rp. 163 Triliun. (cnbcindonesia.com).

Selama empat tahun pemerintahannya di tahun 2014 hingga 2018, Jokowi telah berhasil membangun jalan tol sepanjang

782km. Dengan pencapaiannya tersebut, disebutkan oleh Merdeka.com bahwa pemerintahan era Jokowi telah berhasil membangun jalan tol lebih panjang dibandingkan dengan 40 tahun pemerintahan Orde Baru (13/2/2019).

Meskipun telah banyak melakukan keberhasilan program infrastruktur, termasuk membangun jalan tol, tapi pencapaian ini tidak sepenuhnya diapresiasi oleh masyarakat. Prestasi yang sudah diraih oleh pemerintah di bidang pembangunan infrastruktur ini seringkali dipolitisasi dan dijadikan bahan untuk mendeligitimasi pemerintah sehingga berpotensi

menurunkan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahnya.

Dalam berbagai survei yang dilakukan sejak tahun 2014-2018, menunjukkan adanya fluktuasi indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam berbagai bidang. Berikut hasil survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) Kompas terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi-JK yang dilakukan kepada 1.200 responden berusia 17 tahun dan 32 Provinsi yang dipilih secara proporsional dengan *margin of error plus-minus* 2,8% pada Januari 2015 hingga Oktober 2018.

No.	Bulan	Tahun	Hasil Indeks Kepuasan Publik
1.	Januari	2015	65,1%
2.	April	2015	53,8%
3.	Oktober	2015	54,3%
4.	April	2016	67,4%
5.	Oktober	2016	65,9%
6.	April	2017	63,1%
7.	Oktober	2017	70,8%
8.	April	2018	72,2%
9.	Oktober	2018	65,1%

**Tabel 1.** Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber: Diolah dari Litbang Kompas.

Fluktuatifnya indeks kepuasan masyarakat serta banyaknya isu negatif terkait program infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya disebabkan oleh lambannya penanganan terhadap berbagai isu

yang menyerang pemerintah maupun pribadi Presiden sehingga membuat bola panas informasi di masyarakat semakin sulit dibendung. Di tahun pertama pemerintahannya, manajemen komunikasi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini memang terkesan berjalan secara sporadis dan tidak terkoordinir dengan baik. (Heryanto, 2016).

Presiden telah membuat strategi pengelolaan informasi untuk meningkatkan kembali citra pemerintah, salah satunya dengan cara mengoptimalkan peran komunikasi politik dan diseminasi informasi di pemerintahannya. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik yang mengatur terkait kebijakan dan program pemerintah kepada publik melalui narasi tunggal.

Dalam Inpres tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) yang merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, menjadi salah satu bagian dari tim pengelolaan komunikasi publik sebagai pendukung komunikasi politik, mengelola isu-isu strategis kepresidenan, dan memiliki wewenang untuk memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai visi misi Presiden ([ksp.go.id](http://ksp.go.id)).

Berdasarkan kondisi diatas, maka diperlukan riset untuk menganalisis performa komunikatif di Kantor Staf Presiden khususnya di Kedeputan IV yang membidangi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, khususnya mengenai komunikasi kebijakan

publik yang dilakukan terkait infrastruktur jalan tol untuk melihat model pengelolaan komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dibuat di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Thomas R Dye, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Meskipun dirumuskan oleh pemerintah, tapi kebijakan publik ini sudah merupakan akumulasi dari keinginan masyarakat agar kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak tidak merugikan masyarakat (Abrar, 2008). Untuk melihat performa komunikatif Kantor Staf Presiden, dalam hal ini digunakan model kebijakan William Dunn dimana kegiatan komunikasi kebijakan berada pada level keempat dari model ini, yakni pada tahap implementasi kebijakan.

Konsep performa komunikatif merupakan bagian dari Teori Budaya Organisasi yang pertama kali dimunculkan oleh Pacanowsky dan O'Donnell Trujillo (1982) dengan menyatakan bahwa anggota organisasi melakukan performa komunikasi tertentu yang berakibat pada munculnya budaya organisasi yang unik. Performa (*performance*) adalah metafora yang menggambarkan proses simbolik dari pemahaman akan perilaku manusia dalam sebuah organisasi (West & Lynn, 2013).

Performa komunikatif ini digunakan untuk menganalisis bagaimana komunikasi politik dan diseminasi informasi di Kedeputusan IV Kantor Staf Presiden saat

melakukan tugasnya dilihat dari varian yang terdapat dalam konsep performa komunikatif, yaitu: performa ritual, performa hasrat, performa sosial, performa politis, dan performa enkulturasi (West & Lynn, 2013).

Penelitian ini mencoba untuk mengurai latar belakang dan bagaimana Kedeputusan IV Kantor Staf Presiden dalam melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi kebijakan publik. Adapun komunikasi politik merupakan simbol-simbol atau pesan yang disampaikan dalam komunikasi politik secara signifikan dibentuk atau memiliki konsekuensi terhadap sistem politik. (Cangara, 2016).

Terkait dengan kajian dan penelitian komunikasi politik, ilmuwan politik Harold Lasswell (dalam Nimmo; 2005) melahirkan model lima pertanyaan (*five questions model*) "siapa, berkata apa, kepada siapa, melalui saluran apa, dan bagaimana efeknya.". Dengan rumusan itu, Dan Nimmo melakukan analisis tentang komunikasi politik dengan perspektif mekanistik. Ruang lingkup analisis tersebut mencakup komunikator politik, pesan politik, saluran dan media politik, sasaran atau target politik, serta efek dan pengaruh komunikasi politik. (Nimmo, 2005).

## 2. Kerangka Teori

Peneliti menggunakan kajian literatur dari berbagai sumber yang terkait dengan komunikasi organisasi, komunikasi politik, performa komunikatif, kebijakan publik, serta komunikasi kebijakan.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah pemodelan komunikasi politik dan diseminasi informasi terkait kebijakan infrastruktur yang dilakukan oleh Kedeputian IV Kantor Staf Presiden di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Teori yang digunakan adalah Teori Budaya Organisasi yang merupakan inti dari kehidupan berorganisasi.

Budaya organisasi merupakan sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi mewakili sebuah persepsi yang sama dari para anggota organisasi. (Robbins dan Judge, 2008).

Performa komunikatif, bagian dari teori budaya organisasi. Menurut Richard West dan Lynn H. Turner (2013) dijelaskan bahwa performa komunikatif dalam sebuah organisasi terbentuk atas 5 (lima) bagian, yaitu: (1) Performa ritual (*ritual performance*). Performa ritual merupakan performa yang dilakukan secara konsisten, teratur dan berulang. Performa ritual sendiri terbagi lagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu: (a) Ritual personal (*personal ritual*) Ritual personal ini mencakup segala aktifitas yang secara rutin dilakukan oleh masing-masing individu. (b) Ritual tugas (*task ritual*). Ritual tugas merupakan ritual yang berhubungan dengan perilaku pekerjaan rutin seseorang. (c) Ritual sosial (*social ritual*). Ritual sosial berhubungan dengan kegiatan konsisten berulang-ulang antar satu individu dengan para individu-individu lain dalam sebuah kelompok organisasinya. Ritual sosial ini meliputi rutinitas verbal dan non

verbal yang biasanya mempertimbangkan interaksi dengan orang lain. (d) Ritual organisasi (*organizational ritual*).

Ritual organisasi ini melingkupi cakupan yang lebih luas karena diselenggarakan secara lebih luas dalam sebuah organisasi.

(2) Performa hasrat (*passion performance*). Para anggota organisasi menceritakan terkait organisasinya kepada orang lain. Hasrat (*passion*) di sini menggambarkan keinginan berbagi, *sharing*, atau curhat mengenai kondisi internal berlangsungnya sebuah kebijakan dalam sebuah perusahaan.

(3) Performa sosial (*social performance*). Performa sosial menunjukkan perpanjangan tangan dari sikap kesantunan dan kesopanan diantara anggota organisasi dalam mengomunikasikan keadaan dengan menggunakan simbol-simbol yang sudah ada dalam sebuah organisasi.

(4) Performa politis (*political performance*). Performa ini mendeskripsikan secara jelas makna struktur dan hirarki dalam sebuah birokrasi organisasi, dimana tingkatan kekuasaan dan jabatan diperlihatkan secara jelas. Hal ini ditujukan pada fungsi kontrol sebuah organisasi, yang memerlukan seseorang untuk mengoordinasikan seluruh komponen yang terlibat dalam sebuah proses berorganisasi.

(5) Performa enkulturasi (*enculturation performance*). Performa ini mengacu pada bagaimana anggota mendapatkan keahlian serta pengetahuan agar bisa menjadi anggota yang memiliki kompetensi dan mampu berkontribusi bagi organisasi.

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Namun, sekalipun dirumuskan oleh pemerintah, kebijakan komunikasi ini tidak hanya berisi tentang keinginan pemerintah saja melainkan akumulasi dari keinginan masyarakat agar kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak tidak merugikan masyarakat (Nadya Abrar, 2008).

William mendefinisikan kebijakan publik sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Heryanto, 2017).

Untuk merumuskan sebuah kebijakan publik diperlukan banyak proses dan variable yang harus dikaji. Karena itu, beberapa ahli kebijakan publik melakukan pembagian proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap supaya memudahkan masyarakat dalam proses pengkajiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model kebijakan publik William N Dunn (dalam Winarno; 2014)

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus intrinsik untuk melihat keunikan organisasi Kantor Staf Presiden. Kasus-kasus ini dibatasi oleh waktu dan aktifitas dimana peneliti melakukan pengumpulan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Stake, 1995 dalam Creswell, 2009:20).

Studi kasus berupaya mendapatkan pengetahuan atau pemahaman yang komprehensif dalam mendalami suatu situasi, peristiwa maupun fenomena tertentu dan menghasilkan deskripsi dari pandangan subjek yang diteliti. Sebagai desain berpikir, penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu paradigma yang menekankan bahwa pengetahuan yang telah ditangkap manusia adalah konstruksi manusia itu sendiri (Matthews, 1994 dalam Suparno, 1997).

Teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan 1) Eko Sulistyو selaku Kepala Kedeputian IV Kantor Staf Presiden 2) Alois Wisnuhardana dan Ariani Djalal selaku staf di Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, 3) Agustinus Eko Raharjo selaku staf di Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, 4) Endra Saleh Atmawidjaja selaku Kepala Biro Komunikasi Publik, 5) Krisno Yuwono selaku Kepala Bagian Humas Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, dan 6) Andi Muslim selaku Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Media, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Penelitian ini berpedoman kepada proses analisa data yang diperkenalkan oleh Miles dan Hubberman (Bungin, 2011). Tahapan menganalisis data itu adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan

kesimpulan (*conclusion drawing*) dan verifikasi (*verification*).

Peneliti menggunakan triangulasi dengan melakukan wawancara terkait komunikasi kebijakan infrastruktur kepada Kantor Staf Presiden, lalu melakukan proses kroscek kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (Daymon dan Holloway, 2008).

Kualitas keabsahan penelitian dalam data kualitatif meliputi empat teknik yaitu uji kredibilitas (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan objektivitas (*confirmability*). (Sugiyono, 2007).

Dalam penelitian ini dilakukan uji kredibilitas dengan metode triangulasi data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan melakukan wawancara terkait komunikasi kebijakan infrastruktur kepada Kantor Staf Presiden, lalu melakukan proses kroscek kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Peneliti mencatat wawancara yang dilakukan secara detail sambil melakukan observasi langsung di Kantor Staf Presiden serta melalui dokumentasi yang terdapat dalam pemberitaan di media massa maupun media baru.

#### **4. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pengelolaan komunikasi publik pemerintahan Jokowi diatur dalam Inpres Nomor 9 tahun 2015 terkait narasi tunggal pemerintah sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan memperbesar isu di masyarakat.

Narasi tunggal terkait infrastruktur yang bertujuan menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, konektivitas dan kesejahteraan melalui berbagai program. Diantaranya adalah pembangunan jalan tol, jalan nasional/strategis nasional bukan tol, pembangunan baru dan revitalisasi bandara, bendungan dan jaringan irigasi, sarana dan prasarana kereta api, pembangkit listrik, dan sebagainya. Narasi tunggal dikelola bersama antara Kedeputan IV Kantor Staf Presiden, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sebagainya. Harapannya, komunikasi pemerintah menjadi “satu suara” terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah dan tidak ada lagi kegiatan komunikasi kehumasan yang bersifat ego sektoral.

Adapun pembagian tugas dalam bidang komunikasi serta pola koordinasi antara Kantor Staf Presiden dengan berbagai kementerian terkait, dapat dipetakan melalui hasil analisa performa komunikatif. Menurut Pacanowsky dan O'Donnell Trujillo (1982), performa didefinisikan sebagai metafora yang menggambarkan proses simbolik dari pemahaman akan perilaku manusia dalam sebuah organisasi yang menyatakan bahwa anggota organisasi melakukan performa komunikasi tertentu yang berakibat pada munculnya budaya organisasi yang unik. Adapun indikator dari performa komunikatif ini dibagi ke dalam 5 (lima) performa budaya, yaitu: (1) Performa Ritual.

(a) Ritual Personal, mencakup semua hal yang dilakukan secara rutin oleh individu di tempat kerja. (West dan Turner, 2010). Ritual personal yang dijalani oleh para pegawai di Kantor Staf Presiden pada saat kondisi yang normal, tidak ada konflik atau penugasan khusus, aktivitas di Kedepatian IV Kantor Staf Presiden biasanya akan berjalan sebagaimana di kantor pada umumnya. Jam operasional yang diberlakukan yaitu mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Bagi para pegawai di Kedepatian IV Kantor Staf Presiden, jam kerja tersebut bersifat lebih cair dan fleksibel mengingat pekerjaan mereka lebih banyak dilakukan di lapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, partai politik, kementerian, maupun *stakeholders* lainnya sebagai “mata” dan “telinga” Presiden Jokowi.

Ariani Djalal, Tenaga Ahli Madya, 27 Agustus 2019, Kantor Staf Presiden;

*“Dalam keseharian, kami tidak selalu ada di kantor. Kadang kita langsung bertugas di luar hingga malam hari. Misalkan, ada dana yang sudah dicairkan untuk pembebasan jalan tol, tapi ada laporan bahwa masyarakat belum menerima. Nah, ini kita nanti turun untuk melihat hambatannya ada di mana, atau “tertahan”nya ada di mana misalnya. Lebih ke debottlenecking ya. Ada yang terpecahkan, ada yang tidak.”*

Selain itu, jam kerja yang “cair” dan fleksibel ini juga dipengaruhi oleh latar belakang profesi setiap individu

di Kantor Staf Presiden. Seperti narasumber yang diwawancarai oleh peneliti, mereka sebelumnya berprofesi sebagai politisi, aktivis, wartawan, dan produser film.

(B)Ritual tugas berkaitan dengan kebiasaan dalam melaksanakan tugas yang dilakukan secara rutin dalam pekerjaan sehari-hari. Sesuai dengan Inpres No. 9 tahun 2015, Kantor Staf Presiden menjadi salah satu instansi yang diberi peran dalam melakukan pengelolaan komunikasi publik terkait narasi tunggal.

Pengelolaan komunikasi publik di Kantor Staf Presiden dilakukan oleh Kedepatian IV yang membidangi komunikasi politik dan diseminasi informasi. Bagian komunikasi politik bertugas menjalin komunikasi politik dengan berbagai *stakeholders* seperti mahasiswa, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintahan dan relawan. Sedangkan bagian diseminasi informasi bertugas untuk menyebarkan informasi dengan mengelola dua *website* yaitu *ksp.go.id* dan *presidenri.go.id*, serta media sosial Kantor Staf Presiden.

Dalam menjalankan tugasnya, Kedepatian IV Kantor Staf Presiden melakukan beberapa ritual tugas yang dilakukan secara rutin dan berulang. Untuk saling berbagi informasi, membahas isu terbaru dan menyelesaikan permasalahan lainnya yang terkait dengan tugas Kantor Staf Presiden dilakukan rapat secara rutin di kalangan pimpinan (deputi) yang ada di Kantor Staf Presiden. Rapat pimpinan (rapim) ini dilakukan secara rutin setiap satu minggu sekali. Namun, meskipun dilaksanakan secara rutin satu minggu sekali, tapi dalam rapim ini tidak selalu membahas terkait isu infrastruktur secara khusus.

Setelah melakukan absensi harian, para pegawai di Kedepatian IV KSP, biasanya akan melaksanakan ritual tugasnya yaitu memeriksa surat disposisi yang diberikan oleh pimpinan yaitu Kepala Kedepatian IV Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyio.

Surat disposisi ini diberikan tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi akan disebarluaskan melalui pesan elektronik dengan menggunakan aplikasi *Whatsapp Group*. Adapun isi dari disposisi ini ada beberapa jenis, seperti: disposisi untuk menghadiri atau melaksanakan rapat, melakukan *debottlenecking* bila ada program atau komunikasi yang “tersumbat”, koordinasi dengan kementerian teknis, membentuk satuan tugas atau tim khusus, dan sebagainya.

Disposisi yang diberikan kepada tenaga profesional di Kedepatian IV ini akan disesuaikan dengan bidang pekerjaan atau fokus kerjanya masing-masing. Untuk yang berhubungan dengan partai, akan diberikan kepada tenaga ahli yang ada kaitannya dengan partai, misalnya Ali Mochtar Ngabalin. Begitu juga dengan disposisi yang berkaitan dengan masyarakat dan kementerian terkait lainnya, biasanya akan langsung ditindaklanjuti oleh tenaga ahli yang berkaitan dengan masyarakat dan kementerian terkait, dalam hal ini biasanya diwakili oleh Ariani Djalal dan Alois Wisnuhardana.

Untuk penugasan kepada bawahan di kedepatian masing-masing, biasanya akan langsung disampaikan atau didisposisikan kembali oleh pimpinan dari kedeputiannya masing-masing.

*Debottlenecking*, dalam mengelola komunikasi pemerintahan

yang terdiri dari berbagai *stakeholders*, masalah koordinasi seringkali menjadi kendala tersendiri. Dengan adanya Kantor Staf Presiden, menjadi sangat terbantuan untuk melakukan koordinasi di tingkat kementerian dan kelembagaan karena Kantor Staf Presiden ini ada hubungan langsung dengan Presiden sehingga ada keseganan tersendiri.

Tugas *debottlenecking* ini tidak hanya dilakukan kepada kementerian/ lembaga, tetapi juga kepada parta politik dan masyarakat. Seperti disampaikan oleh Ariani Djalal, Tenaga Ahli Muda Kantor Staf Presiden, bahwa dirinya dan yang lainnya seringkali bertugas di luar untuk menyelesaikan “sumbatan” yang menjadi kendala.

Misalnya dalam kegiatan pembebasan jalan tol, dana dari pusat sudah dicairkan tetapi masyarakat ada yang mengadu (melalui surat atau secara langsung) bahwa mereka belum menerimanya. Di sini Kantor Staf Presiden akan membantu mencari “sumbatan”-nya, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan mengomunikasikan sehingga dana tersebut bisa sampai dan diterima oleh masyarakat.

Contoh lainnya adalah saat pembangunan bandara Kertajati, Majalengka. Setelah tersendat dan hanya menjadi wacana sejak 2003, pada tahun 2018 akhirnya selesai setelah Luhut Binsar Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden membantu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Strategi *debottlenecking* lainnya yang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden untuk mempercepat pengelolaan informasi dan komunikasi

kementerian adalah dengan cara langsung berkoordinasi dengan pimpinan lembaga/ organisasi yaitu melalui Sekretariat Jenderal (Sekjen) atau Direktur Komunikasi Kehumasan yang mengoordinasikan kehumasan internal di kementerian/ lembaga, misalnya saat meminta atau mengumpulkan data untuk membuat laporan-laporan lima tahunan pemerintahan joko Widodo.

Pengelolaan *website* dan media sosial. Ritual tugas lainnya yang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden adalah melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi. Dalam mendiseminasikan kebijakan-kebijakan terkait infrastruktur, Kedepatian IV Kantor Staf Presiden bertugas sebagai pengelola media sosial dan *website* [ksp.go.id](http://ksp.go.id) dan [presidenri.go.id](http://presidenri.go.id) dan media sosial milik KSP Republik Indonesia seperti *Twitter*, *Instagram* dan *Facebook*.

Dalam mengelola *website* maupun media sosialnya, Kantor Staf Presiden mengupayakan untuk membuat konten-konten yang bersifat humanis, menarik, cair, dan berfokus pada *outcome*.

Eko Sulistyو menyebutkan bahwa saat ini Kedepatian IV Kantor Staf Presiden sudah dan sedang melakukan komunikasi infrastruktur dengan menampilkan testimoni warga terkait dampak dan manfaat infrastruktur secara konkret.

Jadi, yang ditampilkan di berita dan video di *website* atau Youtube Kantor Staf Presiden bukan hanya deskripsi pembangunan dan proyeknya, tapi lebih kepada dampaknya, seberapa jauh infrastruktur itu bermakna dan menyejahterakan rakyat. Sebagai contoh, bagaimana jembatan

Holtekamp di Papua bisa memangkas jalan perbatasan dari Jayapura ke Sekaw. Kemudian distribusi harga barang pokok bisa jadi lebih mudah dan murah karena infrastruktur yang memadai, dan sebagainya.

Koordinasi dengan kementerian teknis. Dalam menyukseskan komunikasi infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kantor Staf Presiden juga secara rutin menjalankan tugasnya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku kementerian teknis yang terkait dengan program infrastruktur jalan tol, untuk melakukan strategi komunikasi infrastruktur, khususnya dalam membuat pesan komunikasi.

Dalam membangun narasi dan menyebarluaskan konten narasi tunggal pemerintah seperti yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi dan tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kedepatian IV Kantor Staf Presiden menjadi *supporting sistem* yang bekerja sama dengan semua *Government Public Relations* (GPR) dari Kementerian/Lembaga seperti tenaga humas pemerintah (THP), Pranata Humas, maupun organisasi profesi kehumasan pemerintah lainnya seperti Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) dan Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia.

Di bidang infrastruktur jalan tol ini, Kedepatian IV Kantor Staf Presiden melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Komunikasi dan

Informatika, salah satunya adalah untuk meningkatkan pemberitaan terkait infrastruktur ini. Bersama Kementerian Kominfo, Kantor Staf Presiden berperan sebagai salah satu pihak yang memberikan masukan dan memberikan *direct* terkait isu, konten, *agenda setting* hingga *framing* narasi tunggal terkait infrastruktur jalan tol.

Membentuk Satuan Tugas atau Tim Khusus. Di luar program-program prioritas, tugas lainnya yang dilakukan oleh Kedeputian IV Kantor Staf Presiden adalah melakukan pemantauan dengan pendekatan partisipatif terhadap berbagai perkembangan sosial-politik yang terjadi. Selain itu, KSP juga memiliki tugas untuk merumuskan berbagai masukan kepada Kepala Staf Kepresidenan untuk diputuskan oleh Presiden.

Kedeputian IV bersama kedeputian lainnya di Kantor Staf Presiden juga dapat menginisiasi pembentukan satuan tugas lintas pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti isu tertentu yang sedang berkembang dan membutuhkan respons khusus dan cepat. Hal ini dilakukan atas perintah Presiden melalui Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam bidang infrastruktur yang terkait dengan kebijakan komunikasi jalan tol, Kedeputian IV biasanya membuat satuan tugas atau tim khusus. Misalnya, saat mudik lebaran tahun 2018 dan 2019, Kantor Staf Presiden menginisiasi dibentuknya sebuah tim khusus terkait pemberitaan dan pelaksanaan mudik. Tim ini melakukan serangkaian kegiatan seperti pengecekan arus mudik, persiapan jalan tol, melakukan *Focus Group Discussion* (FGD)

dengan mengundang pihak Jasa Marga, Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), Korps Lalu Lintas, dan sebagainya. Untuk pemberitaannya diintegrasikan dalam sebuah website mudik.go.id dan ksp.go.id.

Ritual sosial merupakan kebiasaan yang dilakukan untuk berhubungan, berkumpul, atau bersosialisasi dengan orang lain. Di Kantor Staf Presiden, ritual sosial antar pekerja dilakukan baik melalui kegiatan non formal seperti *coffee morning*, *syukuran*, *outbound*, *family gathering*, dan sebagainya. Menurut Tenaga Ahli Madya Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ariani Djalal, dalam pertemuan non formal, Kedeputian IV biasanya tidak secara khusus membahas tentang isu infrastruktur, tapi lebih banyak membahas atau bercerita tentang gosip-gosip atau isu-isu politik yang sedang terjadi saat itu.

Untuk memperkuat dan mempererat hubungan antara semua pekerja di Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, biasanya dilakukan juga kegiatan non-formal seperti menyelenggarakan acara *family gathering*, olah raga bersama setiap Hari Jum'at, merayakan syukuran, atau mengobrol bersama teman satu profesi.

Dalam ritual sosial yang dilakukan di internal Kantor Staf Presiden, pembahasan terkait infrastruktur biasanya mengemuka dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat non-formal. Seperti membahas perkembangan jalan tol, bandara internasional di Yogyakarta, dan sebagainya. Menurut Eko Sulisty, perbincangan terkait infrastruktur selalu ada dalam suasana non-formal

karena dapat dirasakan dampaknya dalam infrastruktur transportasi.

Ritual organisasi. Kegiatan dalam ritual organisasi ini meliputi hubungan antara kedeputian IV dengan kedeputian lainnya di Kantor Staf Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sebagainya.

Untuk level organisasi lintas kedeputian di Kantor Staf Presiden maupun koordinasi dengan kementerian lainnya, terdapat sebuah tim yang bertugas untuk melakukan monitoring, evaluasi, membuat kontra narasi sekaligus membuat materi untuk Presiden. Tim ini diberi nama tim *Newsroom* yang terdiri dari pegawai Kantor Staf Presiden dan humas dari berbagai Kementerian/Lembaga teknis yang terkait dengan isu yang sedang dibahas.

Dalam level yang lebih luas, terdapat juga *situation room* berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan koordinasi lintas departemen, lintas kementerian/lembaga sampai dengan pemerintah daerah berdasarkan data/informasi dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal yang sudah tervalidasi dan terpercaya. (ksp.go.id).

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi utama melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis, secara organisasi Kantor Staf Presiden melakukan berbagai kegiatan yang implementasinya dijalankan setiap tiga bulan sekali dan dilaporkan pada bulan ke-3, bulan ke-6, bulan ke-9 dan bulan ke-12.

Fungsi sebagai pengendali program, Kantor Staf Presiden

melakukan kegiatan seperti berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, terutama Bappenas, untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan program-program prioritas nasional seperti Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Reformasi Agraria, Energi, Jaminan Sosial, Penyelesaian HAM, Papua, dan lainnya. (kabarbisnis24.com).

Selain itu, untuk menyelesaikan masalah terkait program-program prioritas nasional secara komprehensif, Kantor Staf Presiden lebih berperan sebagai fasilitator dengan cara berkoordinasi dengan setiap pemangku kepentingan yang terlibat untuk membicarakan penyebab terjadinya hambatan yang dihadapi serta bagaimana penyelesaian terbaik yang dapat menguntungkan semua pihak.

Menjalankan fungsi pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional, Kantor Staf Presiden telah melakukan pemantauan program prioritas nasional bersama-sama sejumlah Kementerian/Lembaga terkait.

Fungsi pengelolaan isu-isu strategis dan penyampaian analisis data dan informasi strategis, Kantor Staf Presiden melalui berbagai kedeputian yang ada di Kantor Staf Presiden, melakukan pengkajian terhadap berbagai isu strategis baik yang diminta oleh Presiden maupun yang teridentifikasi berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan maupun yang terpantau melalui wacana publik di media.

Berbagai informasi dan sebaliknya mengkomunikasikan berbagai hal, Kantor Staf Presiden

juga berusaha membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan khususnya yang menyangkut program-program prioritas presiden.

Selain itu, Kantor Staf Presiden juga turut menginisiasi adanya kegiatan Forum Merdeka Barat 9. Forum Merdekan 9 merupakan forum resmi pemerintah dalam menyampaikan informasi strategis, kebijakan lintas sektoral, dan klarifikasi isu yang berkembang di masyarakat. Di dalam forum ini, terdapat para menteri dan pemimpin lembaga yang diminta untuk menyosialisasikan program strategis kementeriannya untuk menyampaikan informasi strategis kepada masyarakat.

Sebagai contoh, acara Forum Merdeka Barat 9 edisi 4 tahun kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema “Pembangunan Ekonomi dan Daya Saing” yang membahas terkait berbagai pencapaian dan progres pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi dan daya saing Bangsa.

Dalam acara yang ditayangkan pada 23 Oktober 2023 tersebut, hadir sebagai narasumber antara lain Moeldoko (Kepala Kantor Staf Presiden), Basuki Hadimuljono (Kepala Kementerian PUPR), Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika), Darmin Nasution (Menko Perekonomian), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Airlangga Hartanto (Menteri Perindustrian), Arief Yahya (Menteri Pariwisata), Enggartiaso Lukita (Menteri Perdagangan), dan Susi Pujiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan).

(1) Performa hasrat dalam hal ini berkaitan dengan kisah-kisah

mengenai organisasi yang seringkali diceritakan secara antusias oleh para anggota organisasi dengan orang lain. Performa ini terlihat dari narasi-narasi yang diceritakan oleh Kedeputian IV Kantor Staf Presiden kepada publiknya, yaitu masyarakat Indonesia.

Selain ingin menyampaikan tentang visi Indonesia sentris sebagai salah satu konsen dari instansinya, Kedeputian IV Kantor Staf Presiden juga berusaha memperlihatkan komitmennya *debottlenecking* dan sebagai “mata” serta “telinga” Presiden Jokowi.

Untuk menceritakan performa hasratnya ini kepada publik, para pegawai Kedeputian IV Kantor Staf Presiden ini juga seringkali melakukan kunjungan kedinasan ke berbagai daerah dan pelosok di Indonesia untuk melihat dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat sebagai salah satu fungsi mereka sebagai “mata” dan “telinga” Presiden.

Eko Sulistyono, Kepala Kedeputian IV, 24 September 2019, Kantor Staf Presiden;

*“Ada 3 (tiga) hal yang ingin disampaikan atau diceritakan oleh Kantor Staf Kepresidenan kepada publik. Pertama, Kantor Staf Presiden sebagai debottlenecking infrastruktur yang artinya mengatasi sumbatan dalam bidang infrastruktur. Kedua, Kantor Staf Presiden sebagai tim Think Tank atau “kepala”-nya presiden yang menjadi tempat penyelesaian masalah karena disinilah pemikirnya yang berasal dari lima*

*kedeputian dan 5 bidang yang berbeda. Ketiga, Kantor Staf Presiden sebagai “mata” dan “telinga” Presiden.”*

Untuk menceritakan performa hasratnya ini kepada publik, para pegawai Kedeputian IV Kantor Staf Presiden ini juga seringkali melakukan kunjungan kedinasan ke berbagai daerah dan pelosok di Indonesia untuk melihat dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat sebagai representasi tugas mereka sebagai “mata” dan “telinga” Presiden. Selain itu, performa Hasrat ini juga diperlihatkan oleh para stafnya dalam media sosial pribadinya yang berhubungan dengan pekerjaannya, termasuk dalam komunikasi kebijakan infrastruktur seperti yang dilakukan oleh Alois Wisnuhardana melalui akun media sosial *Facebook* yang dimilikinya.

(2) Performa sosial didefinisikan sebagai perpanjangan sikap santun dan kesopanan untuk mendorong kerja sama diantara anggota organisasi. Performa sosial di Kantor Staf Presiden yang berkaitan dengan isu infrastruktur ini dilakukan dengan menjalin hubungan baik, kerja sama dan koordinasi bersama kementerian terkait yang membidangi komunikasi dan infrastruktur yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Untuk meningkatkan kedekatan dan kebersamaan dengan kolega atau rekan kerjanya di kementerian/lembaga lain, Kedeputian IV Kantor Staf Presiden berusaha menciptakan hubungan yang baik secara informal seperti mengikuti acara makan bersama, hadir di acara

syukuran, mengikuti kegiatan *tour* saat kunjungan ke lokasi tinjauan proyek infrastruktur, dan sebagainya.

Selain menyelenggarakan kegiatan untuk kolega dari kementerian/lembaga lainnya di pemerintahan, Kantor Staf Presiden juga mengajak wartawan untuk melakukan liputan dan melihat langsung ke lokasi proyek jalan tol atau proyek lainnya yang sedang dibangun. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan pemberitaan terkait infrastruktur dan dalam pelaksanaannya biasanya Kantor Staf Presiden akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Performa sosial ini juga dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui kerja sama antar anggota tim, termasuk saat mengemas pesan-pesan komunikasi bersama kementerian terkait. Meskipun diakui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa dalam menentukan pesan komunikasi infrastruktur Presiden lebih banyak ditentukan oleh Kantor Staf Presiden, namun proses kesopanan dalam menjalin kemitraan dan kerjasama tetap dilakukan.

(3) Performa politik menjabarkan tentang kedudukan Kedeputian Kantor Staf Presiden di dalam skema pemerintahan Republik Indonesia serta hubungan antara atasan dan bawahan yang terjadi di Kantor Staf Kepresidenan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, secara politik kedudukan Kantor Staf Presiden ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Presiden Jokowi

memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan kepala dan tenaga profesional di Kantor Staf Presiden.

Selain hubungan antara Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi terhadap Kantor Staf Presiden, dalam performa politis juga dapat dilihat hubungan antara Kepala Kantor Staf Kepresidenan bersama bawahannya, termasuk gaya kepemimpinan para pemimpin tertinggi di Kantor Staf Presiden ini mengingat selama 5 (lima) tahun periode pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2019), sudah terjadi tiga kali pergantian kepemimpinan di Kantor Staf Kepresidenan. Adapun ketiga pimpinan Kantor Staf Kepresidenan tersebut adalah sebagai berikut: Luhut Binsar Panjaitan, Teten Masduki dan Moeldoko.

Pada setiap fase kepemimpinan Kepala Staf Presiden tersebut, terdapat perbedaan gaya kepemimpinan sesuai dengan kepribadian dan latar belakang profesi yang pernah dijalani oleh ketiganya.

Eko Sulistyono, Kepala Kedeputian IV, 24 September 2019, Kantor Staf Presiden;

*“Baik Pak Luhut, Pak Teten, maupun Pak Moeldoko, memiliki perbedaan gaya dan cara. Tapi, pada prinsipnya adalah sama-sama ingin memastikan janji kampanye Pak Jokowi ini dalam fokus infrastruktur 5 tahun pertama bisa dilaksanakan. Dan saya rasa Pak Teten dan Pak Moeldoko juga konsekuen untuk mengawal program prioritas ini.”*

Baik pada masa pemerintahan Luhut, Teten maupun Moeldoko,

infrastruktur selalu menjadi bagian dari fokus Kantor Staf Presiden baik dari sisi kebijakan maupun sisi komunikasi kebijakan publiknya. Luhut Binsar Panjaitan, sesuai dengan backgroundnya di bidang militer, memiliki performa politis yang lebih tegas. Disampaikan oleh Ariani Djalal bahwa di periode-periode awal Kantor Staf Presiden, sangat terasa banyak kebuntuan pembangunan yang sudah terpecahkan. Di masa kepemimpinan Teten Masduki, permasalahan lebih banyak diselesaikan dengan membentuk *ad hoc*, dan di masa kepemimpinan Moeldoko lebih kepada pendekatan penguatan struktural.

(4) Performa *enkulturasi (enculturation performance)* merujuk pada bagaimana anggota mendapatkan pengetahuan dan keahlian untuk dapat menjadi anggota organisasi yang mampu berkontribusi meningkatkan kinerja organisasinya. Enkulturasi dianggap sebagai proses 'mengajarkan' budaya kepada anggota organisasi. (Littlejohn, 2002).

Dalam performa enkulturasi ini, Kantor Staf Presiden melakukan enkulturasi pesan kepada kolega-koleganya yakni kementerian teknis terkait isu infrastruktur sehingga terbangun *mutual understanding* antara Kantor Staf Presiden dengan *stakeholdernya*.

Untuk membangun *mutual understanding* antara pelaku komunikasi di lingkaran Presiden seperti Tim Komunikasi Presiden (TKP), Staf Khusus Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta semua humas dari kementerian teknis lainnya, Kedeputian IV Kantor Staf Presiden melakukan berbagai koordinasi dan

pertemuan dengan *stakeholders* lainnya, misalnya dengan Kementerian yang terkait dengan komunikasi dan infrastruktur, yakni Kementerian PUPR serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Bila ada proyek baru yang akan dibangun, Kantor Staf Presiden sudah memiliki ketentuan dan langkah-langkah tersendiri untuk mengomunikasikan terkait isu ini kepada bagian internalnya. Sebagai contoh, sosialisasi kebijakan infrastruktur baru itu secara teknis berada di Kedepatian I. Jadi sudah menjadi tugas bagi Kedepatian I untuk menyampaikannya kepada berbagai pihak mengingat infrastruktur merupakan wilayah pekerjaan mereka. Tapi semua isu tetap dipahami oleh Kedepatian IV dan saling *sharing*.

Peningkatan kemampuan para pegawai di Kedepatian IV Kantor Staf Presiden dalam mengenkulturasi pesan dan informasi terkait infrastruktur, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun komunikasi internal dan eksternal yang solid, serta membangun kapasitas (*capacity building*) para pekerjanya.

Sebagai upaya untuk menguatkan kapasitas tenaga profesional di Kedepatian IV Kantor Staf Presiden, *Newsroom* Kantor Staf Presiden pernah menggelar workshop lintas kedepatian yang digelar selama satu hari dan membahas materi tentang teknik pembuatan rilis pers, bagaimana berbicara di depan televisi, bagaimana menangani media (*media handling*), serta tips memanfaatkan media sosial untuk *branding personal* dan organisasi.

Peningkatan kapasitas di bidang komunikasi dan diseminasi informasi ini diperlukan untuk memudahkan para tenaga ahli tersebut dalam menjalankan tugasnya untuk mengomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintahan era Presiden Jokowi, termasuk kebijakan infrastruktur. Terkait komunikasi kebijakan infrastruktur, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah dinilai sudah lebih baik.

## 5. Simpulan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Jokowi-JK. Performa komunikasi Kantor Staf Presiden dalam komunikasi politik dan diseminasi informasi infrastruktur ditunjukkan melalui lima bagian yaitu performa ritual (ritual personal, ritual tugas, ritual sosial dan ritual organisasi), performa hasrat, performa sosial, performa politis dan performa enkulturasi.

Diantara keseluruhan ritual tersebut, yang paling dominan karena dilakukan secara teratur dan berulang adalah performa ritual tugas. Adapun ritual tugas yang dilakukan antara lain melalui kegiatan: (1) Rapat rutin; (2) Membuat disposisi; (3) *Debottlenecking*; (4) Pengelolaan website; (5) Koordinasi dengan Kementerian Teknis; (6) Memantau perkembangan sosial dan politik; (7) Merumuskan berbagai masukan untuk Presiden; (8) membentuk satgas/timsus untuk terlibat dalam proses perencanaan hingga evaluasi program prioritas pemerintah.

Performa tugas ini dilakukan untuk menjalankan tugas utama Kantor Staf Presiden sebagai *debottlenecking* yaitu membantu

“melancarkan sumbatan” yang menjadi penghambat bagi terlaksananya program strategis,

lembaga “*Think Tank*” dan berfungsi sebagai “*Mata*” dan “*Telinga*” Presiden.

### **Daftar Pustaka**

- Bungin, Burhan. (2008). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cangara, Hafied. (2014). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Creswell John. (2010). *Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William dalam Budi Winarno. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Bandung: Centre of Academic Publishing Service.
- Holloway, I. dan Daymon, C. (2008). *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations & Marketing Communications*. Yogyakarta : PT. Bentang Pustaka.
- Littlejohn, W. Stephen. (2002) *Theories of Human Communication*. New Mexico. Wadsworth.
- Nadyaabrar, Ana. (2008). *Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat, dan Praktek.*, Gava Media, Yogyakarta,
- Nimmo, Dan. (2005). *Komunikasi Politik: Komunikator Pesan dan Media*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. (2008). *Perilaku Organisasi Edisi ke-12*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, Paul. (1997). *Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- West Richard & Turner Lynn. (2013). *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Buku 1, Edisi ketiga*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Heryanto, Gun Gun. (2016). *Efektivitas Jubir Presiden*, Koran Sindo, 4 Februari 2016.
- Iswari Anggit Pramesti. (2019). *Sederet Bukti Konkret Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi!* – Cnbc.com. Diakses pada 7 Desember 2019, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190214123837-4-55506/sederet-bukti-konkret-pembangunan-infrastruktur-era-jokowi>.
- Muhammad Genantan Saputra. (2019). *Infrastruktur, Kebutuhan Politik atau Kesejahteraan Rakyat*. -Merdeka.com. diakses pada 6 April 2019, dari <https://www.merdeka.com/uang/infrastruktur-kebutuhan-politik-atau-kesejahteraan-rakyat.html>.
- <http://ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/index.html>.
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20180209/15/736777/ini-agenda-prioritas-kantor-staf-presiden-2018>.

**WAWANCARA**

Krisno Yuwono, Kepala Bagian Humas  
Kementerian PUPR, 6 Mei 2019.

Alois Wisnuhardana, Tenaga Ahli  
Madya Kantor Staf Presiden, 27 Mei  
2019.

Ariani Djalal, Tenaga Ahli Madya  
Kantor Staf Presiden, tanggal 27 Agustus  
2019.

Andi Muslim, Kepala Seksi Kemitraan  
Komunikasi Media Kementerian  
Komunikasi dan Informatika, 2  
September 2019.

Agustinus Eko Rahardjo, Tenaga Ahli  
Kantor Staf Presiden, tanggal 24  
September 2019.

Eko Sulistyono, Kepala Kedepatian IV  
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia  
tanggal 24 September 2019.

Endra Saleh Atmawidjaja, Kepala Biro  
Komunikasi Publik Kementerian  
Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat, 19 Oktober 2019